

## ABSTRAK

Pemogokan kerja merupakan hak dasar dalam melakukan tindakan tersebut para pihak tetap harus mentaati ketentuan perundang-undangan. dengan demikian, para pihak tidak menggunakan haknya sekehendak hati secara gegabah, mereka harus tetap memenuhi rambu-rambu hukum yang berlaku. kesemuanya ini di maksudkan semata-mata agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas dan berakibat fatal. Permasalahan yang akan dibahas kali ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah kepada perusahaan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis mogok kerja yang di lakukan PT. Lion Air, PT. Semadam dan PT.freeport, dan mengetahui kendala-kendala perusahaan dalam menuntun kerugian yang di alami akibat pekerja mogok kerja tidak sah.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan mengkaji penelitian hukum positif dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis yaitu tentang pertanggung jawaban pekerja mogok kerja tidak sah. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Mogok kerja yang di lakukan oleh pekerja PT. Lion Air & PT. Semadam merupakan mogok kerja tidak sah, mogok kerja yang di lakukan oleh kedua kasus ini bertentangan dengan pasal 140 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, merugikan pihak perusahaan serta pihak-pihak yang memiliki kaitannya, sesuai dengan kepmen no 232 tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak sah pasal 6 dan 7 dikulifikasikan mangkir dan mengundurkan diri. para pekerja melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) karena adanya kerugian yang di alami perusahaan. kendala-kendala yang di rasakan perusahaan menuntut hak pada pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah terkendala kurangnya aturan yang memperkuat perusahaan jika perusahaan yang mengalami kerugian, kesetaraan antara pekerja dan perusahaan tidak terlaksana ketika adanya kesalahan yang dilakukan oleh pekerja.

Kata Kunci: Mogok Kerja Tidak Sah, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Ganti Rugi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

## ABSTRACT

Strikes in job are a basic right to take an action. Parties must still obey the provisions of the legislation. Therefore, the parties do not exercise their rights rashly, they must completed the applicable legal guidelines. All of this is intended solely to prevent the effects caused are not widespread and fatal. The issue that will be discussed is how the liability of employees who carry out illegal strikes to the company. The purpose of this research is to analyze the strikes carried out by PT. Lion Air, PT. Semadam and PT.freeport, and to know the company's constraints in demanding losses suffered due to illegal strike workers.

The approach method used by the author in the preparation of this research paper was a normative legal research method with the purpose to analyze the problems carried out by reviewing positive legal research in this case was written legal material that was about the liability of illegal strike workers. The research specification in this research used analytical descriptive research, which is a method used to describe a condition or condition that is happening or ongoing in order to provide as much data as possible about the object of research so that it can explore things that are ideal, then analyzed based on legal theory or applicable law.

The results of this research paper can be concluded that the strike was carried out by workers of PT. Lion Air & PT. Semadam is an illegal strike, the strikes carried out by two cases are contrary to article 140 of Law No. 13 of 2003 Concerning Employment, detrimental to the company and and its related parties, according to Ministerial Decree No. 232 of 2003 Concerning the Consequences of Illegal Strike Law Articles 6 and 7 are qualified defaulters and resignations. The employees are committing acts against the law Article 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) because of the loss suffered by the company. The obstacles experienced by the company demanding the right of employees whose go on strike illegally constrained by the lack of rules that strengthen the company if the company suffers losses, the equality between employees and the company is not implemented when there are mistakes made by employees.

Keywords: Illegal Strike in Job, Act Against the Law (PMH), Compensation, Termination of Employment (FLE)